

TESIS

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BOS REGULER SMP NEGERI DI
KABUPATEN SUMEDANG**

(Studi Kasus di SMPN Satu Atap Cikawao Pamulihan, SMPN 3 Tanjungsari dan
SMPN Satu Atap Cimanggung)

Disusun Oleh

NAMA : LINDA ROSMAWATI FATIMAH
NOMOR POKOK : E. 050 116 0006
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI

Diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh
gelar Magister Sains (M.Si) dalam Ilmu Administrasi



PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI

SEBELAS APRIL SUMEDANG

2021

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
SEBELAS APRIL SUMEDANG**

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis

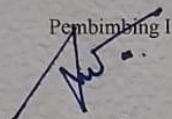
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BOS REGULER SMP NEGERI DI
KABUPATEN SUMEDANG**

(Studi Kasus di SMPN Satu Atap Cikawao Pamulihan, SMPN 3 Tanjungsari dan
SMPN Satu Atap Cimanggung)

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

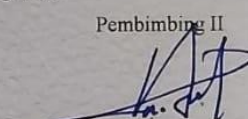
Pembimbing Tesis

Pembimbing I



Dr. H. Akadun, M.Pd.
NIDN : 0030086401

Pembimbing II



Dr. Arip Rahman Sudrajat, M.Si.
NIDN : 0418118402

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
SEBELAS APRIL SUMEDANG**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BOS REGULER SMP NEGERI DI
KABUPATEN SUMEDANG**

(Studi Kasus di SMPN Satu Atap Cikawao Pamulihan, SMPN 3 Tanjungsari dan
SMPN Satu Atap Cimanggung)

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat penulisan Tesis pada Program Magister
Ilmu Administrasi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
Sebelas April Sumedang

Disusun Oleh

Linda Rosmawati Fatimah

E. 050 116 0006

Mengetahui

Ketua STIA Sebelas April Sumedang



Rika Kusdinar, S.Sos., M.Si.

NIDN : 04.3012.7102

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Saya menyatakan bahwa Tesis dengan judul: **Implementasi Kebijakan Bos Reguler SMP Negeri di Kabupaten Sumedang** (Studi Kasus di SMPN Satu Atap Cikawao Pamulihan, SMPN 3 Tanjungsari dan SMPN Satu Atap Cimanggung) ini, sepenuhnya karya saya sendiri. Tidak ada bagian didalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pun pengutipan dengan cara yang tidak sesuai etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Sumedang, Agustus 2021
Yang membuat pernyataan,

Linda Rosmawati Fatimah
E. 050 116 0006

STIA
SEBELAS APRIL
SUMEDANG

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BOS REGULER SMP NEGERI DI KABUPATEN SUMEDANG

(Studi Kasus di SMPN Satu Atap Cikawao Pamulihan, SMPN 3 Tanjungsari dan
SMPN Satu Atap Cimanggung)

112 halaman, 5 bab, 74 tabel, 4 gambar, 4 lampiran.

Daftar Pustaka: 21 buku dan peraturan, 4 artikel lain-lain (1945-2024).

Pemerataan kesempatan mendapatkan pendidikan merupakan salah satu yang menentukan keberhasilan pembangunan Sumber Daya Manusia. Salah satu upaya pemerataan pendidikan adalah kebijakan BOS Reguler. Oleh karena itu, implementasi kebijakan BOS Reguler SMP Negeri menjadi salah satu prasyarat keberhasilan pembangunan SDM. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan, untuk mengetahui faktor yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan dan untuk mengetahui upaya untuk mengatasi hambatan implementasi kebijakan BOS Reguler SMP Negeri di Kabupaten Sumedang.

Desain penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Informan penelitian berjumlah 6 orang terdiri dari Kepala Sekolah dan Staf Tata Usaha (SMPN Satu Atap Cikawao Pamulihan, SMPN 3 Tanjungsari dan SMPN Satu Atap Cimanggung). Teknik pengumpulan data terdiri dari studi kepustakaan dan lapangan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan. Prosedur pengolahan data dilakukan reduksi data, penyajian, kesimpulan dan gabungan.

Hasil penelitian adalah implementasi kebijakan BOS Reguler SMP Negeri sudah cukup baik, berdasarkan unsur ukuran dan tujuan, sumberdaya kebijakan, keberhasilan kebijakan, sikap atau kecendrungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana serta menilai kinerja keberhasilan (diantaranya menggunakan jabatan dalam melaksanakan pengelolaan dana sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai Juklak dan Juknis), terdapat faktor yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan BOS Reguler SMP Negeri (diantaranya ketaataan terhadap peraturan dalam pengelolaan dana masih sering tumpang tindih peraturan dalam pelaporan keuangannya) dan terdapat upaya-upaya untuk mengatasi hambatan implementasi kebijakan BOS Reguler SMP Negeri di Kabupaten Sumedang (diantaranya dalam mengantisipasi keterlambatan pencairan dengan dana talang yang dipinjam pihak sekolah).

Saran penelitian diantaranya antisipasi anggaran, dengan mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten maupun di tingkat Pusat.

Kata kunci: Implementasi, kebijakan dan BOS Reguler SMP Negeri.

ABSTRACT

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BOS REGULER SMP NEGERI DI KABUPATEN SUMEDANG

(Studi Kasus di SMPN Satu Atap Cikawao Pamulihan, SMPN 3 Tanjungsari dan
SMPN Satu Atap Cimanggung)

112 pages, 5 chapters, 74 tables, 4 pictures, 4 appendices.

Bibliography: 21 books and regulations, 4 miscellaneous articles (1945-2024).

Equitable opportunity to get education is one that determines the success of human resource development. One of the efforts to equalize education is the Regular BOS policy. Therefore, the implementation of the Regular BOS policy for public junior high schools is one of the prerequisites for the success of human resource development. The purpose of this study was to determine the implementation of the policy, to determine the factors that hindered the success of policy implementation and to find out the efforts to overcome the obstacles to the implementation of the Regular BOS policy at the State Junior High School in Sumedang Regency.

The research design used is qualitative research methods and the results of qualitative research emphasize more on meaning than generalization. The research informants consisted of 6 people consisting of the Principal and Administrative Staff (One Roof Junior High School Cikawao Pamulihan, SMPN 3 Tanjungsari and SMPN One Roof Cimanggung). Data collection techniques consist of literature and field studies with observations, interviews, documentation and combinations. Data processing procedures carried out data reduction, presentation, conclusion and combination.

The results of the study are that the implementation of the Regular BOS policy for SMP Negeri is quite good, based on the elements of size and objectives, policy resources, policy success, attitudes or tendencies of implementers, communication between organizations and implementing activities and assessing the performance of success (including using positions in implementing fund management in accordance with with the applicable rules and in accordance with the Technical Guidelines and Guidelines), there are factors that hinder the successful implementation of the Regular BOS policy for State Junior High Schools (among which compliance with regulations in fund management still often overlaps with regulations in financial reporting) and there are efforts to overcome obstacles to the implementation of the BOS policy. Regular SMP Negeri in Sumedang Regency (including in anticipating delays in disbursement with bailout funds borrowed by the school).

Research suggestions include budget anticipation, by holding consultations and coordination with the Education Office at the Regency level and at the center level.

*Keywords: Implementation, policy and Regular BOS for State
Junior High Schools.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur hanya kepada *Allah SWT*, karena atas rahmat dan hidayahnya. Sehingga, penyusunan Tesis yang dilaksanakan di SMPN Satu Atap Cikawao, SMPN 3 Tanjungsari dan SMPN Satu Atap Cimanggung Kabupaten Sumedang terselesaikan walau dengan kekurangan. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi, Muhammad *SAW*, keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya yang berjuang menyebarkan ajarannya hingga akhir zaman.

Tesis dengan judul **Implementasi Kebijakan BOS Reguler SMP Negeri di Kabupaten Sumedang** (Studi Kasus di SMPN Satu Atap Cikawao Pamulihan, SMPN 3 Tanjungsari dan SMPN Satu Atap Cimanggung), ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Magister Sains Program Magister Ilmu Administrasi pada STIA Sebelas April Sumedang. Peneliti ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada yang terhormat.

1. Rika Kusdinar, S.Sos., M.Si, selaku Ketua Program Magister Ilmu Administrasi STIA Sebelas April Sumedang.
2. Dr. H. Akadun, M.Pd, selaku Pembimbing I.
3. Dr. Arip Rahman Sudrajat, M.Si, selaku Pembimbing II.
4. Segenap Dosen dan pegawai Program Magister Ilmu Administrasi STIA Sebelas April Sumedang.
5. Yayat Suhayati, S.Pd., MM.Pd, selaku Kepala SMPN Satu Atap Cikawao Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang.
6. Segenap Guru dan pegawai SMPN Satu Atap Cikawao Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang.
7. Drs. Asep Supriatna, MM.Pd, selaku Kepala SMPN 3 Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang.
8. Segenap Guru dan pegawai SMPN 3 Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang.
9. Dadan Andana, M.Pd, selaku Kepala SMPN Satu Atap Cimanggung Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang.

10. Segenap Guru dan pegawai SMPN Satu Atap Cimanggung Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang.
11. Keluarga besar, yang selalu memotivasi untuk segera menyelesaikan studi.
12. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi STIA Sebelas April Sumedang.

Akhir kata, peneliti berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca. Semoga *Allah SWT*, senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua. *Amin*.

Sumedang, Agustus 2021

Peneliti



DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR JUDUL		
LEMBAR PERSETUJUAN		
LEMBAR PENGESAHAN		
LEMBAR PERSEMBAHAN		
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS		
ABSTRAK		
KATA PENGANTAR	viii	
DAFTAR ISI	x	
DAFTAR TABEL	xiii	
DAFTAR GAMBAR	xvii	
DAFTAR LAMPIRAN	xviii	
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Penelitian.....	1
	B. Fokus Permasalahan.....	4
	C. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	4
	1. Maksud Penelitian.....	4
	2. Tujuan Penelitian.....	5
	D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Hakekat Administrasi.....	6
	B. Hakekat Administrasi Negara.....	7
	C. Ruang Lingkup Administrasi Negara.....	9
	D. Kaitan Administrasi Negara dengan Variabel Penelitian.....	10
	E. Kebijakan.....	11
	1. Pengertian Kebijakan.....	11
	2. Ciri-ciri Kebijakan.....	13
	F. Kebijakan Publik.....	14
	1. Pengertian Kebijakan Publik.....	14
	2. Ciri-ciri Kebijakan Publik.....	16

3. Karakteristik Kebijakan Publik	17
G. Pelaksanaan/Implementasi Kebijakan	18
1. Pengertian Implementasi Kebijakan	18
2. Syarat-syarat Implementasi Kebijakan	20
3. Faktor-faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan	27
H. Kajian Penelitian Terdahulu	31
I. Kerangka Pemikiran	32
J. Hipotesis Penelitian	38
BAB III	
METODOLOGI PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	39
B. Penentuan Sasaran dan Informan Penelitian	41
1. Penentuan Sasaran	41
2. Informan Penelitian	42
C. Teknik Pengumpulan Data	42
D. Prosedur Pengolahan Data	43
E. Jadwal Penelitian	45
BAB IV	
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	46
1. Visi dan Misi serta Struktur Organisasi	46
2. Data Potensi	48
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	52
1. Implementasi Kebijakan BOS Reguler SMP Negeri	52
1.1 Ukuran dan Tujuan	52
1.2 Sumberdaya Kebijakan	56
1.3 Keberhasilan Kebijakan	60
1.4 Sikap atau Kecendrungan para Pelaksana	63
1.5 Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana	67
1.6 Menilai Kinerja Keberhasilan	70
2. Faktor yang Menghambat Keberhasilan Implementasi Kebijakan BOS Reguler SMP Negeri	74

2.1	Isi Kebijakan	74
2.2	Informasi	78
2.3	Dukungan	82
2.4	Pembagian Potensi	86
3.	Upaya-upaya untuk Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan BOS Reguler SMP Negeri	91
3.1	Peraturan Hukum ataupun Kebijakan itu Sendiri.....	91
3.2	Mentalitas Petugas yang Menerapkan Hukum atau Kebijakan.....	94
3.3	Fasilitas	98
3.4	Warga Masyarakat sebagai Objek.....	102
BAB V	PENUTUP	
A.	Simpulan	109
B.	Saran	111
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		
BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS		
RIWAYAT HIDUP PENULIS		

STIA
SEBELAS APRIL
SUMEDANG

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu.....	32
Tabel 2.2 Besaran BOS Reguler di Kabupaten Sumedang	36
Tabel 2.3 Kisi-kisi Pertanyaan	38
Tabel 3.1 Penentuan Sasaran di SMPN Satu Atap Cikawao.....	41
Tabel 3.2 Penentuan Sasaran di SMPN 3 Tanjungsari.....	41
Tabel 3.3 Penentuan Sasaran di SMPN Satu Atap Cimanggung	42
Tabel 3.4 Jadwal Penelitian.....	45
Tabel 4.1 Data Siswa di SMPN Satu Atap Cikawao Pamulihan	49
Tabel 4.2 Data Ruang Kelas.....	49
Tabel 4.3 Data Ruang Lainnya.....	49
Tabel 4.4 Data Guru di SMPN 3 Tanjungsari.....	49
Tabel 4.5 Data Staf Tata Usaha.....	50
Tabel 4.6 Data Siswa.....	50
Tabel 4.7 Data Sarana dan Prasarana	50
Tabel 4.8 Data Jumlah Siswa Berdasarkan Penghasilan Orang Tua/Wali di SMPN Satu Atap Cimanggung	51
Tabel 4.9 Data Jumlah Siswa Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	51
Tabel 4.10 Data Prasarana.....	51
Tabel 4.11 Triangulasi Sumber Data tentang Ukuran Keberhasilan.....	53
Tabel 4.12 Triangulasi Metode Pengumpulan Data tentang Ukuran Keberhasilan.....	53
Tabel 4.13 Triangulasi Sumber Data tentang Cara Mencapai Keberhasilan.....	54
Tabel 4.14 Triangulasi Metode Pengumpulan Data tentang Cara Mencapai Keberhasilan.....	55
Tabel 4.15 Triangulasi Sumber Data tentang SDM yang Handal	57
Tabel 4.16 Triangulasi Metode Pengumpulan Data tentang SDM yang Handal.....	57
Tabel 4.17 Triangulasi Sumber Data tentang Cara Membina SDM	58

Tabel 4.18 Triangulasi Metode Pengumpulan Data tentang Cara Membina SDM.....	59
Tabel 4.19 Triangulasi Sumber Data tentang Kriteria Persyaratan.....	60
Tabel 4.20 Triangulasi Metode Pengumpulan Data tentang Kriteria Persyaratan.....	61
Tabel 4.21 Triangulasi Sumber Data tentang Cara Memenuhi Kriteria.....	62
Tabel 4.22 Triangulasi Metode Pengumpulan Data tentang Cara Memenuhi Kriteria.....	62
Tabel 4.23 Triangulasi Sumber Data tentang Sikap Pelaksana Kebijakan	64
Tabel 4.24 Triangulasi Metode Pengumpulan Data tentang Sikap Pelaksana Kebijakan	64
Tabel 4.25 Triangulasi Sumber Data tentang Cara Membina Sikap.....	65
Tabel 4.26 Triangulasi Metode Pengumpulan Data tentang Cara Membina Sikap	66
Tabel 4.27 Triangulasi Sumber Data tentang Komunikasi antar Instansi.....	67
Tabel 4.28 Triangulasi Metode Pengumpulan Data tentang Komunikasi antar Instansi.....	68
Tabel 4.29 Triangulasi Sumber Data tentang Cara Menjalinkan Komunikasi	69
Tabel 4.30 Triangulasi Metode Pengumpulan Data tentang Cara Menjalinkan Komunikasi.....	69
Tabel 4.31 Triangulasi Sumber Data tentang Ukuran Evaluasi	71
Tabel 4.32 Triangulasi Metode Pengumpulan Data tentang Ukuran Evaluasi	71
Tabel 4.33 Triangulasi Sumber Data tentang Cara Mencapai Evaluasi.....	72
Tabel 4.34 Triangulasi Metode Pengumpulan Data tentang Cara Mencapai Evaluasi	73
Tabel 4.35 Triangulasi Sumber Data tentang Pemahaman Tujuan Program	75
Tabel 4.36 Triangulasi Metode Pengumpulan Data tentang Pemahaman Tujuan Program.....	76
Tabel 4.37 Triangulasi Sumber Data tentang Pemahaman Sasaran.....	77
Tabel 4.38 Triangulasi Metode Pengumpulan Data tentang Pemahaman Sasaran.....	77

Tabel 4.39 Triangulasi Sumber Data tentang Penyampaian Informasi.....	79
Tabel 4.40 Triangulasi Metode Pengumpulan Data tentang Penyampaian Informasi.....	79
Tabel 4.41 Triangulasi Sumber Data tentang Isi Informasi antar Instansi.....	81
Tabel 4.42 Triangulasi Metode Pengumpulan Data tentang Isi Informasi antar Instansi.....	81
Tabel 4.43 Triangulasi Sumber Data tentang Dukungan Fasilitas.....	83
Tabel 4.44 Triangulasi Metode Pengumpulan Data tentang Dukungan Fasilitas.....	83
Tabel 4.45 Triangulasi Sumber Data tentang Kerjasama antar Instansi	85
Tabel 4.46 Triangulasi Metode Pengumpulan Data tentang Kerjasama antar Instansi	85
Tabel 4.47 Triangulasi Sumber Data tentang Diferensiasi Tugas Program.....	87
Tabel 4.48 Triangulasi Metode Pengumpulan Data tentang Diferensiasi Tugas Program	88
Tabel 4.49 Triangulasi Sumber Data tentang Pembagian Tugas	89
Tabel 4.50 Triangulasi Metode Pengumpulan Data tentang Pembagian Tugas	89
Tabel 4.51 Triangulasi Sumber Data tentang Pemahaman Tujuan Program	91
Tabel 4.52 Triangulasi Metode Pengumpulan Data tentang Pemahaman Tujuan Program.....	92
Tabel 4.53 Triangulasi Sumber Data tentang Pemahaman Sasaran.....	93
Tabel 4.54 Triangulasi Metode Pengumpulan Data tentang Pemahaman Sasaran.....	93
Tabel 4.55 Triangulasi Sumber Data tentang Penyampaian Informasi.....	95
Tabel 4.56 Triangulasi Metode Pengumpulan Data tentang Penyampaian Informasi.....	95
Tabel 4.57 Triangulasi Sumber Data tentang Isi Informasi antar Instansi.....	97
Tabel 4.58 Triangulasi Metode Pengumpulan Data tentang Isi Informasi antar Instansi.....	97
Tabel 4.59 Triangulasi Sumber Data tentang Dukungan Fasilitas.....	99

Tabel 4.60 Triangulasi Metode Pengumpulan Data tentang Dukungan Fasilitas.....	99
Tabel 4.61 Triangulasi Sumber Data tentang Kerjasama antar Instansi	101
Tabel 4.62 Triangulasi Metode Pengumpulan Data tentang Kerjasama antar Instansi	101
Tabel 4.63 Triangulasi Sumber Data tentang Diferensiasi Tugas Program	103
Tabel 4.64 Triangulasi Metode Pengumpulan Data tentang Diferensiasi Tugas Program	103
Tabel 4.65 Triangulasi Sumber Data tentang Pembagian Tugas	105
Tabel 4.66 Triangulasi Metode Pengumpulan Data tentang Pembagian Tugas	105
Tabel 4.67 Perbandingan Implementasi Kebijakan BOS Reguler SMP Negeri.....	107



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	37
Gambar 3.1 Desain Penelitian	40
Gambar 3.2 Prosedur Pengolahan Data	44
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	48



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Panduan Observasi

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 Panduan Dokumentasi

Lampiran 4 Jawaban Wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan bermutu merupakan pendidikan yang mampu mewujudkan harapan masyarakat, mengembangkan potensi peserta menjadi kemampuan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup. Mutu pendidikan menjadi barometer derajat kemajuan yang memposisikan martabat suatu bangsa.

Bangsa Indonesia telah merancang sistem pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa.

Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang.

Pemerintah mengusahakan satu sistem pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa.

Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan dalam hal pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Implementasi kebijakan Undang-Undang di atas, dalam Pasal 1 bahwa “sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional”.

Sistem pendidikan nasional berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dalam Pasal 1 sebagai berikut.

1. Sekolah menengah pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
2. Bantuan operasional sekolah reguler yang selanjutnya disingkat BOS Reguler adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus non fisik.

Berdasarkan uraian di atas, SMP Negeri diharapkan menjadi pedoman dalam menyusun program untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan dapat menjelma menjadi sekolah yang mampu membentuk lulusan yang unggul dalam prestasi akademis, non akademis yang berlandaskan religi, budaya dan berwawasan lingkungan.

Implementasi kebijakan BOS Reguler yang dilaksanakan oleh SMP Negeri di Kabupaten Sumedang didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di atas, dalam Pasal 2 bahwa “dana BOS Reguler bertujuan untuk membantu biaya operasional sekolah dan meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik”.

Fenomena masalah implementasi kebijakan BOS Reguler selama ini, yaitu masih terdapat sekolah dalam penggunaan dana menyimpang dari petunjuk teknis. Penyimpangan ini disebabkan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) tidak mengatur secara jelas cara penyusunan dan mekanisme pengesahan dari RAPBS menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) serta Kepala Sekolah tidak transparan dalam mengelola dana.

Berdasarkan uraian di atas, implementasi kebijakan tidak jarang bertolak belakang dengan apa yang diharapkan. Bahkan, jika tidak dilakukan secara hati-hati maka implementasinya akan jadi batu sandungan bagi pembuat kebijakan.

Implementasi kebijakan BOS Reguler harus melalui proses perencanaan sehingga menjadi rumusan kebijakan yang benar-benar sesuai dengan konsep dan kondisi objektif. Tahapan implementasi kebijakan menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan observasi peneliti, diperoleh gambaran bahwa implementasi kebijakan BOS Reguler SMP Negeri di Kabupaten Sumedang masih belum baik, hal ini didasarkan pada indikator sebagai berikut.

1. Dana BOS Reguler terkadang belum diperuntukan pada prioritas. Hal ini sesuai wawancara dengan Guru SMPN Satu Atap Cikawao Pamulihan, diperoleh informasi bahwa “menginginkan proses belajar berjalan dengan baik namun tidak ditunjang sarana infrastruktur yang baik”.
2. Akurasi data antara Tim Pengelola BOS Reguler di sekolah dengan Tim Manajemen Dinas Pendidikan masih terdapat perbedaan. Hal ini sesuai wawancara dengan Staf Tata Usaha SMPN 3 Tanjungsari, diperoleh informasi bahwa “penyaluran dana terkadang tidak tepat jumlah. Hal ini dapat dikarenakan lemahnya Tim Pengelola BOS Reguler dalam proses pengisian data siswa secara *on line*”.
3. Pengawasan BOS Reguler masih belum efektif. Hal ini sesuai wawancara dengan Guru SMPN Satu Atap Cimanggung, diperoleh informasi bahwa “untuk mengawasi penyaluran, mulai pendataan hingga penyalurannya, belum disiapkan beberapa Tim Pengawas agar benar-benar mengena dan efisien”.

Berdasarkan indikator di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut yang dituangkan ke dalam Usulan Penelitian dengan judul **Implementasi Kebijakan BOS Reguler SMP Negeri di Kabupaten Sumedang** (Studi Kasus di SMPN Satu Atap Cikawao Pamulihan, SMPN 3 Tanjungsari dan SMPN Satu Atap Cimanggung).

B. Fokus Permasalahan

Berdasarkan latar belakang dan indikator tersebut di atas, maka pernyataan masalah yaitu implementasi kebijakan BOS Reguler SMP Negeri di Kabupaten Sumedang masih belum baik. Sedangkan, pertanyaan masalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi kebijakan BOS Reguler SMP Negeri di Kabupaten Sumedang?
2. Adakah faktor yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan BOS Reguler SMP Negeri di Kabupaten Sumedang?
3. Upaya-upaya apa untuk mengatasi hambatan implementasi kebijakan BOS Reguler SMP Negeri di Kabupaten Sumedang?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian

Maksud penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu untuk mengetahui implementasi kebijakan BOS Reguler SMP Negeri di Kabupaten Sumedang.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan maksud penelitian di atas, tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan BOS Reguler SMP Negeri di Kabupaten Sumedang.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan BOS Reguler SMP Negeri di Kabupaten Sumedang.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya untuk mengatasi hambatan implementasi kebijakan BOS Reguler SMP Negeri di Kabupaten Sumedang.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka kegunaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah referensi tentang administrasi negara kepada Program Magister Ilmu Administrasi pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang, khususnya teori mengenai implementasi kebijakan.
2. Kegunaan Praktis, hasil penelitian ini diharapkan untuk memberikan masukan kepada SMP Negeri Satu Atap Cikawao Kecamatan Pamulihan, SMP Negeri 3 Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari dan SMP Negeri Satu Atap Cimanggung Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang dalam rangka mengoptimalkan implementasi kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hakekat Administrasi

Hakekat administrasi yang sesungguhnya sangat luas, istilah administrasi berhubungan dengan kegiatan kerjasama yang dilakukan sekelompok manusia sehingga tercapai tujuan. Handyaningrat (2014: 1) administrasi dalam arti sempit adalah “kegiatan surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda yang bersifat teknis ketatausahaan”. Silalahi (2015: 5) adalah.

Penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti beranggapan bahwa administrasi secara sempit merupakan pencatatan data untuk mempermudah memperolehnya kembali. Tujuannya hanya sebagai data informasi apabila kembali dibutuhkan.

White (Handyaningrat, 2014: 1) administrasi dalam arti luas adalah ‘suatu proses yang pada umumnya terdapat pada suatu usaha kelompok, negara atau sipil atau militer, usaha besar atau usaha kecil dan sebagainya’. Silalahi (2015: 5) adalah “kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien”.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti beranggapan bahwa administrasi secara luas merupakan kegiatan kerjasama yang dilakukan sekelompok manusia berdasarkan pembagian kerja untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Gie (Silalahi, 2015: 9) administrasi adalah ‘segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan’. Siagian (Silalahi, 2015: 9) adalah ‘keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam bentuk usaha kerjasama demi tercapainya tujuan’.

Siagian (2014:107) fungsi-fungsi administrasi diantaranya.

1. Perencanaan, proses pemikiran yang matang untuk dilakukan di masa yang akan datang dengan menentukan kegiatannya.
2. Pengorganisasian, pengelompokkan orang, peralatan, kegiatan, tugas dan tanggungjawab.
3. Pemberian motivasi, pemberian dorongan kepada pegawai untuk bekerja lebih bergairah.
4. Pengawasan, proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan untuk menjamin agar semua pekerjaan dapat berjalan sesuai rencana.
5. Penilaian, proses pengukuran dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti beranggapan bahwa administrasi sebagai suatu proses yang terdapat pada suatu organisasi serta sekelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan yang disepakati bersama dengan menggunakan fungsi-fungsi administrasi.

B. Hakekat Administrasi Negara

Administrasi negara merupakan salah satu aspek kegiatan pemerintah dan salah satu bagian dari ilmu administrasi yang erat kaitannya dengan manajemen. Administrasi negara menurut Pfiffner dan Presthus (Handyaningrat, 2014: 3) adalah ‘proses yang berhubungan dengan pelaksanaan negara’. Mintorogo (2015: 65) adalah “berdasarkan tujuan dan sifat kerjasama yang pada prinsipnya untuk memberikan pelayanan kepada publik”.

Atmosudirjo (Iskandar, 2017: 54) tiga arti penting administrasi negara diantaranya yaitu.

1. Administrasi negara sebagai aparatur negara, aparatur pemerintah atau sebagai institusi politik (kenegaraan).
2. Administrasi negara sebagai fungsi atau sebagai aktivitas melayani pemerintah, yakni sebagai kegiatan pemerintah bidang operasional.
3. Administrasi negara sebagai suatu proses teknis penyelenggaraan Undang-Undang.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti beranggapan administrasi negara merupakan proses berhubungan dengan pelaksanaan negara berdasarkan tujuan dan sifat kerjasama yang pada prinsipnya untuk memberikan pelayanan publik.

Ciri administrasi negara menurut Nigro (Silalahi, 2015: 10) diantaranya.

1. Merupakan usaha kelompok kerjasama dalam susunan kenegaraan.
2. Mencakup yaitu eksekutif, legislatif dan yudisial serta saling hubungan antar ketiganya.
3. Mempunyai peran penting dalam perumusan kebijakan umum (negara).
4. Secara nyata berbeda dari administrasi swasta.
5. Erat kaitannya dengan berbagai kelompok swasta maupun individu dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat.

Ciri-ciri administrasi negara menurut Thoha (2015: 68) diantaranya:

1. Komitmen terhadap misi, semangat menetes dari pimpinan ke pegawai, administrator antusias tentang misi organisasi maka pegawai akan mencerminkan perasaan itu. Pada masa krisis, administrator yang hebat mengingatkan staf mereka tentang tujuan misi mereka dan peran yang dimainkan organisasi mereka dalam masyarakat yang lebih besar dalam rangka mencapai suatu tujuan.
2. Visi strategis, seseorang administrator publik harus selalu tetap fokus pada visi strategis dan misi jangka panjang dari lembaga atau organisasi. Anggota staf dapat menjadi sangat terobsesi dengan operasi sehari-hari dari agen, tetapi mengandalkan pemimpin mereka untuk memahami rencana kerja.
3. Kelompok, pentingnya keterampilan konseptual adalah penginderaan organisasi secara keseluruhan dan dari situasi total yang relevan dengannya. Apa yang dimaksudkan adalah bahwa pemimpin harus selalu dapat melihat bagaimana satu keputusan mempengaruhi setiap bagian dari organisasi. Anggota staf hanya dapat melihat sejauh departemen atau pemimpin harus selalu melihat melampaui batasan itu.

4. Terperinci, sama pentingnya dengan para pemimpin untuk melihat gambaran besar dan berpikir secara strategis, sama pentingnya bagi mereka untuk memperhatikan detailnya. Ini tidak berarti bahwa para pemimpin harus terlibat dalam setiap keputusan kecil, atau melemahkan keputusan bawahan, sebaliknya, para pemimpin harus tetap sadar akan aktivitas staf mereka, memungkinkan otonomi kapan memungkinkan dalam mencapai suatu tujuan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti beranggapan bahwa ciri terpenting administrasi negara dalam pelaksanaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terlepas pada komitmen terhadap misi, visi strategis, kelompok dan terperinci yang sedang berkembang.

C. Ruang Lingkup Administrasi Negara

Administrasi negara merupakan aspek kegiatan pemerintahan. Ruang lingkup administrasi negara menurut Henry (Waluyo, 2007: 35) diantaranya.

1. Organisasi publik, berkenaan dengan model-model organisasi dan perilaku birokrasi.
2. Manajemen publik, berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik dan Manajemen Sumber Daya Manusia.
3. Implementasi, menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasi, privatisasi, administrasi pemerintah dan etika birokrasi.

Ruang lingkup administrasi negara sebagai seni mempunyai kriteria-kriteria menurut Mintorogo (2015: 7) diantaranya.

1. Tidak berdasarkan hasil pengkajian secara ilmiah.
2. Berdasarkan akal sehat atau pemikiran rasional.
3. Mengambil kesimpulan dari hal umum menuju ke hal yang khusus.
4. Dari hal yang khusus ditarik menjadi bersifat umum (metode induksi).

Ruang lingkup administrasi negara sebagai ilmu mempunyai sifat-sifat menurut Mintorogo (2015: 8) diantaranya.

1. Empiris, perkembangan pengetahuan administrasi negara telah dikembangkan melalui penelitian oleh para pakar dan telah melalui berbagai diskusi dan konperensi ilmiah yang membahas tentang administrasi negara.
2. Sistematis, semua pengetahuan tentang aspek rangkaian kegiatan merupakan kumpulan pengetahuan yang saling berkaitan dan saling tergantung satu sama lain, sehingga merupakan suatu kebulatan.
3. Objektif, pengetahuan tentang administrasi negara diperoleh dari pernyataan-pernyataan yang berdasarkan fakta penelitian, bukannya berdasarkan perasaan, prasangka ataupun kesukaan perseorangan.
4. Analitis, ilmu administrasi negara membedakan substansinya dalam bagian-bagian yang menunjukkan spesialisasi dalam berbagai bidang.
5. Dapat diperiksa kebenarannya, ilmu selalu mengarah pada kebenaran, kebenaran ini dapat berupa kaidah-kaidah yang bersifat universal.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti beranggapan bahwa ruang lingkup administrasi negara merupakan proses seni serta ilmu tentang manajemen untuk mengatur yang didasarkan pada kriteria dan sifatnya dalam pelaksanaan pemerintahan negara guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

D. Kaitan Administrasi Negara dengan Variabel Penelitian

Administrasi negara mempunyai kaitan yang erat dengan implementasi kebijakan, karena implementasi merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses administrasi negara. Hal ini sesuai Grindle (Iskandar, 2017: 9) bahwa.

Tidak ada organisasi (administrasi negara) yang sanggup mencukupi kepentingan dirinya sendiri. Semuanya tergantung kepada implementasi sistem manajemen yang lebih besar untuk terus hidup. Sudah pasti pula elemen itu saling koordinasi antara satu elemen dengan elemen lainnya.

Lineberry (Waluyo, 2007: 49) proses administrasi negara setidaknya memiliki elemen diantaranya.

1. Pembentukan unit organisasi baru dan staf pelaksana;
2. Penjabaran tujuan ke dalam berbagai aturan pelaksana (SOP);
3. Manajemen berbagai sumber dan pengeluaran kepada kelompok sasaran, pembagian tugas di dalam dan diantara dinas/badan pelaksana;
4. Implementasi pengalokasian sumber daya untuk mencapai tujuan.

Terciptanya administrasi negara yang baik dapat mempengaruhi dan dipengaruhi suatu organisasi. Hal ini sesuai Komarudin (Achmad, 2019: 194) bahwa ‘adanya administrasi negara yang baik diharapkan akan mempengaruhi implementasi kinerja pegawai dalam bentuk kesediaan anggota suatu kelompok untuk kerjasama dalam mencapai tujuan’.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti beranggapan bahwa variabel penelitian ini sebagai kajian administrasi negara, karena adanya administrasi negara yang baik diharapkan akan mempengaruhi implementasi kinerja pegawai dalam bentuk kesediaan pegawai untuk kerjasama dalam mencapai tujuan.

E. Kebijakan

1. Pengertian Kebijakan

Istilah kebijakan (*policy*) menurut Dunn (2000: 1) mengemukakan bahwa.

Secara etimologis, istilah kebijaksanaan datang dari Yunani, Sansekerta, dan Latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan Sansekerta *polis* (negara kota) dan *pur* (kota) masuk ke dalam bahasa Latin menjadi *politea* (negara) dan akhirnya ke dalam bahasa Inggris pertengahan *policie*, yang berkenaan dengan pengendalian, masalah publik atau administrasi pemerintahan. Asal kata *policy* sama dengan kata *poelicy* dan *politics*.

Bagi para pembuat kebijakan (*policy maker*) istilah-istilah tersebut di atas, tidak akan menimbulkan masalah apapun karena menggunakan referensi yang sama. Namun, bagi orang yang berada di luar struktur pengambilan kebijakan istilah-istilah tersebut mungkin akan membingungkan.

Dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan lebih luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah serta perilaku negara pada umumnya.

Makna kebijakan tersebut akan semakin jelas apabila mengikuti pendapat Friedrich (Islamy, 2001: 17) kebijaksanaan yaitu.

... a proposed course of action of a person, group, or government within a given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach a goal or realize an objective or a purpose.

(... serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu).

Anderson (Islamy, 2001: 17) kebijaksanaan adalah.

A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern.

(Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Anderson (Wahab, 2018: 2) mengemukakan pengertian kebijakan yaitu ‘merumuskan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu’. Menurut Islamy (2001:16) mengemukakan bahwa “kebijaksanaan memerlukan pertimbangan yang menekankan pada kearifan seseorang, sedangkan kebijakan mencakup aturan yang ada di dalamnya”.

Gorich yang dikutip oleh Santoso (1990:9) mengemukakan bahwa ‘kebijakan merupakan segala usaha yang dikehendaki pemerintah dan sejalan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai melalui program-program pemerintah’.

Berdasarkan Perserikatan Bangsa-bangsa yang dikutip oleh Wahab (2018: 2) mengemukakan bahwa ‘kebijakan adalah suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana’.

Kebijaksanaan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Hal ini sesuai menurut Islamy (2001: 17) bahwa suatu kebijaksanaan memuat 3 (tiga) elemen sebagai berikut.

1. Identitas dari tujuan yang ingin dicapai.
2. Taktik/strategi dari berbagai langkah mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Penyediaan berbagai *input* untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah.

2. Ciri-ciri Kebijakan

Ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan-kebijakan negara bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan oleh orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik seperti ketua adat, ketua suku, para eksekutif, para legislator, para hakim, dan para administrator.

Orang-orang tersebut di atas, merupakan orang-orang yang dalam kesehariannya terlibat dalam urusan politik dari sistem politik dan dianggap oleh sebagian besar warga sistem politik itu sebagai pihak yang bertanggungjawab atas urusan politik tadi dan berhak untuk mengambil tindakan tertentu sepanjang tindakan tersebut masih berada dalam batasan peran dan kewenangannya.

Wahab (2018: 6) mengemukakan ciri-ciri kebijakan membawa implikasi tertentu terhadap kebijakan publik sebagai berikut.

1. Kebijakan negara lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan negara dalam sistem-sistem politik modern pada umumnya bukanlah merupakan tindakan yang serba kebetulan, melainkan tindakan yang direncanakan.

2. Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan yang saling terkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.
3. Kebijakan bersangkutan dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu.
4. Kebijakan negara mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif. Dalam bentuk yang positif, kebijakan negara mungkin akan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu, sementara dalam bentuk negatif kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah di mana campur tangan pemerintah justru diperlukan.

Santoso (1990: 11) mengemukakan sebagai berikut.

Pengertian kebijakan berbeda dengan kebijaksanaan yang sama dengan *wisdom* yang memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih jauh lagi. Sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya, sudut pandangnya terhadap kebijakan sebagai berikut.

1. Kebijakan berisi suatu program kegiatan yang mendukung nilai-nilai tertentu dan kegiatannya diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Darimana kebijakan itu berasal.
3. Kebijakan sebagai penetapan program.
4. Pengaruh kebijakan itu punya kekuatan yang besar untuk mempengaruhi orang banyak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti mempunyai gambaran bahwa pemerintah mempunyai peran yang sangat strategis dalam proses kebijakan, di mana kebijakan merupakan penetapan tindakan-tindakan pemerintah yang dilaksanakan dalam bentuk tindakan yang nyata serta dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

F. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Istilah kebijakan publik menurut Nakamura dan Smallwood (Putra, 2001: 30) yaitu ‘serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan’.

Rose (Dunn, 2000: 21) bahwa ‘kebijakan publik merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah’. Sedangkan, kebijakan publik menurut Laswell dan Kaplan (Islamy, 2001: 19) yaitu ‘suatu program pencapaian tujuan, nilai dan praktek-praktek’.

Dye (Islamy, (2001: 18) mendefinisikan kebijaksanaan negara adalah ‘... *whatever governments choose to do or not to do* (... apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan)’.

Edwards III dan Sharkkansky (Islamy, 2001: 18) mengartikan kebijaksanaan negara yaitu.

... what governments say and do, or do not do. It is the goals or purpose of governments programs ...

(... apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah. Kebijaksanaan negara itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah ...).

Kebijakan publik menurut Santoso (1990: 3) mengemukakan yaitu.

Serangkaian tindakan yang dibuat oleh pemerintah/negara untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, yang didalamnya juga terdapat petunjuk-petunjuk untuk mencapai tujuan tersebut dalam bentuk peraturan-peraturan dan dekrit-dekrit pemerintah.

Anderson (Islamy, 2001: 19) mengemukakan bahwa.

Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials.

(Kebijaksanaan negara adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah).

Ruang lingkup kebijakan publik menurut Santoso (1990: 6) bahwa.

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dipilih dan dialokasikan secara sah oleh pemerintah/negara kepada seluruh anggota masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan publik. Kebijakan publik secara rinci meliputi.

1. Tuntutan kebijakan.
2. Kebijakan keputusan.

3. Pernyataan kebijakan.
4. Keleluasaan kebijakan.

Islamy (2001: 20) pengertian kebijaksanaan negara mempunyai implikasi sebagai berikut.

1. Bahwa kebijaksanaan negara itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah.
2. Bahwa kebijaksanaan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuknya yang nyata.
3. Bahwa kebijaksanaan negara baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
4. Bahwa kebijaksanaan negara itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kebijaksanaan publik (negara) merupakan penetapan tindakan pemerintah yang senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat dalam mencapai suatu tujuan tertentu.

2. Ciri-ciri Kebijakan Publik

Kebijakan publik berarti melakukan tindakan yang dipilih oleh pejabat publik dalam mengatakan sesuatu masalah atau serangkaian masalah. Apabila pemerintah bermaksud untuk melakukan sesuatu, maka kebijakan publik harus meliputi semua tindakan pemerintah.

Ciri-ciri kebijakan publik membawa implikasi menurut Dye (Ekowati, 2009: 39) sebagai berikut.

1. Kegiatan berorientasi pada tujuan, daripada kepada merubah perilaku.
2. Kebijakan terdiri dari rangkaian kegiatan yang dilaksanakan aparat pemerintah, daripada keputusan-keputusan sekehendaknya.
3. Kebijakan publik merupakan apa yang sebenarnya harus dilakukan serta mengendalikan, bukannya apa yang akan mereka lakukan.

4. Kebijakan publik sebaiknya berupa hal yang positif, bukan negatif.
5. Kebijakan publik sekalipun berbentuk hal yang positif tetap harus berdasarkan kepada norma serta ketentuan hukum yang berlaku.

Ciri-ciri lain kebijakan publik menurut Islamy (2001: 19) sebagai berikut.

1. Bahwa kebijakan publik, selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi kepada beberapa tujuan tertentu;
2. Bahwa kebijakan publik itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
3. Bahwa kebijakan publik merupakan apa yang dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang pemerintah akan melakukan sesuatu.
4. Bahwa kebijakan publik itu bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu, atau dapat bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
5. Bahwa kebijakan publik setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa (otoritatif).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti menyimpulkan bahwa ciri-ciri kebijakan publik merupakan kebijakan pemerintah yang ditetapkan untuk dilaksanakan dengan sebaik mungkin, yang pada akhirnya menuju sasaran pembaharuan di kehidupan masyarakat.

3. Karakteristik Kebijakan Publik

Apabila suatu kebijakan telah disahkan oleh pihak yang berwenang, maka keputusan kebijakan itu telah siap untuk diimplementasikan. Hal tersebut sesuai menurut Islamy (2001: 78) langkah-langkah perumusan kebijaksanaan negara sebagai berikut.

1. Perumusan masalah kebijaksanaan negara.
2. Penyusunan agenda pemerintah.
3. Perumusan usulan kebijaksanaan negara.
4. Pengesahan kebijaksanaan negara.
5. Pelaksanaan kebijaksanaan negara.
6. Penilaian kebijaksanaan negara.

Nigel yang dikutip oleh Santoso (1990: 5) mengemukakan 2 hal pokok batasan kebijakan publik sebagai berikut.

1. Mengenai isi, sebab dan akibat dari alternatif-alternatif kebijakan bertalian dengan masalah-masalah kemasyarakatan.
2. Hanya memasukan kebijakan publik, kebijakan negara atau kebijakan pemerintah sebagai objek studi kebijakan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti dapat menjelaskan bahwa kebijakan publik mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut.

1. Keputusan-keputusan tersebut satu sama lain saling berkaitan, hal ini berarti antara keputusan yang satu dengan yang lainnya mempunyai keterkaitan.
2. Kebijakan publik merupakan konsep untuk berbuat atau tidak berbuat.
3. Kebijakan publik harus mempunyai satu tujuan tertentu, dibuat untuk mengatur sesuatu yang berhubungan dengan tatanan pemerintahan atau hubungan pemerintah dengan masyarakat, baik yang bersifat hak maupun kewajiban.
4. Kebijakan publik dibuat dalam rangka menjalankan tugas pemerintah, setiap kebijakan publik yang ditetapkan pemerintah pada dasarnya adalah sebagai pegangan dalam rangka menjalankan tugas di dalam organisasi pemerintahan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa dengan adanya kebijakan publik tersebut, pembagian tugas di dalam penyelenggaraan mekanisme kegiatan organisasi pemerintahan akan menjadi jelas serta merupakan satu kepastian hukum bagi para pelaksana.

G. Pelaksanaan/Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Pelaksanaan (Implementasi) kebijakan merupakan salah satu tahap penting dalam perumusan kebijaksanaan negara.

Keberhasilan maupun kegagalan kebijakan dapat dilihat dari tahap implementasi kebijakan tersebut. Maka, implementasi kebijakan merupakan perwujudan nyata dari kebijakan yang telah dirumuskan agar memperoleh hasil sebagaimana yang telah diharapkan.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (Wahab, 2018: 65) implementasi yaitu “pelaksanaan dan atau penerapan”. Sedangkan, Van Meter dan Van Horn (Wahab, 2018: 65) pengertian implementasi kebijakan yaitu.

Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam segala keputusan kebijakan.

Santoso (1990: 23) bahwa “implementasi kebijakan merupakan serangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan yang telah dirumuskan, tanpa suatu pelaksanaan, maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan itu sia-sia belaka”.

Dunn (2000: 23) mengemukakan bahwa “implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai dicapainya hasil kebijakan”. Mazmanian dan Sabatier (Wahab, 2018: 68) mengemukakan bahwa:

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang. Namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan eksekutif yang penting/keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses imlementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan Undang-Undang, kemudian *output* kebijaksanaan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi pelaksana), kesediaannya dilaksanakan keputusan tersebut oleh kelompok sasaran, dampak nyata---baik yang dikehendaki atau yang tidak---dari *output* tersebut, dampak keputusan sebagai dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan) terhadap UU/peraturan yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan yang berupa Undang-Undang, peraturan, perintah atau keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau badan peradilan yang berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu.

2. Syarat-syarat Implementasi Kebijakan

Jones (Waluyo, 2007: 118) bahwa proses implementasi kebijakan terdapat 3 aktivitas sebagai berikut '*organization, interpretation dan application*'.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, lebih lanjut Waluyo (2007: 118) menjelaskan proses implementasi kebijakan terdapat 3 aktivitas sebagai berikut.

1. Aktivitas pengorganisasian.

Suatu upaya menetapkan serta menata kembali sumber daya (*resources*), unit-unit (*units*), dan metode-metode (*methods*) yang mengarah pada upaya mewujudkan atau merealisasikan kebijakan menjadi hasil (*out come*) sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan.

2. Aktivitas interpretasi.

Aktivitas interpretasi (penjelasan) substansi dari suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan serta diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan.

3. Aktivitas aplikasi.

Aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada.

Implementasi kebijakan tercapai apabila memenuhi syarat implementasi kebijakan menurut Hogwood dan Gunn (Wahab, 2018: 71) sebagai berikut.

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana tidak akan menimbulkan kendala/gangguan yang serius;
2. Pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber yang cukup memadai;
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia;
4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang handal;
5. Hubungan bersifat langsung dan sedikit mata rantai penghubungnya;
6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil;
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan;
8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat;
9. Komunikasi dan koordinasi;
10. Pihak-pihak memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, lebih lanjut Wahab (2018: 71) menjelaskan syarat-syarat implementasi kebijakan sebagai berikut.

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius.

Beberapa kendala/hambatan pada saat implementasi kebijaksanaan seringkali berada di luar kendali para administrator, sebab hambatan-hambatan itu memang di luar jangkauan wewenang kebijaksanaan dan badan pelaksana. Maka, implementasi merupakan suatu proses melaksanakan kebijakan (baik nasional maupun lokal) melalui satu atau serangkaian program atau proyek dengan implikasi pengaturan dan pengalokasian tertentu serta konsekuensi pengaruh atau dampak yang ditimbulkannya. Adapula kemungkinan hambatan-hambatan itu bersifat politis, dalam artian bahwa baik kebijaksanaan maupun tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melaksanakannya tidak diterima/tidak disepakati oleh berbagai pihak yang kepentingannya terkait (misalnya tokoh partai, golongan militer) yang memiliki kekuasaan membatalkannya.

Kendala-kendala semacam ini cukup jelas dan mendasar sifatnya, sehingga sedikit sekali yang bisa diperbuat oleh administrator guna mengatasinya (dalam kapasitasnya sebagai penasihat) ialah mengingatkan bahwa kemungkinan semacam itu perlu dipikirkan matang sewaktu merumuskan kebijaksanaan.

2. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber yang cukup memadai.

Syarat kedua ini sebagian tumpang tindih dengan syarat pertama di atas, dalam pengertian bahwa kerap kali muncul diantara kendala yang bersifat eksternal. Jadi kebijaksanaan yang memiliki tingkat kelayakan fisik dan politis bisa saja tidak berhasil mencapai tujuan. Alasan yang biasanya dikemukakan ialah terlalu banyak berharap dalam waktu yang terlalu pendek jika persoalannya menyangkut sikap dan perilaku. Alasan lainnya ialah bahwa politisi kadangkala peduli dengan pencapaian tujuan, sehingga tindakan pembatasan terhadap pembiayaan program mungkin akan membahayakan upaya pencapaian tujuan karena sumber yang tidak memadai. Perlu pula ditegaskan disini, bahwa dana itu pada dasarnya bukanlah sumber itu sendiri, sebab tidak lebih dari sekedar tiket dengan mana akan dapat diperoleh sumber yang sebenarnya, karena itulah kemungkinan masih proses konversinya proses mengubah uang itu menjadi sumber dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan program.

3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.

Persyaratan ketiga ini lazimnya mengikuti persyaratan kedua di atas, dalam artian bahwa di satu pihak harus dijamin tidak terdapat kendala-kendala pada semua sumber-sumber yang diperlukan dan dilain pihak, pada tahapan proses implementasinya perpaduan diantara sumber tersebut harus benar disediakan.

4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal.

Kebijakan kadang kala tidak dapat diimplementasikan secara efektif bukan lantaran telah diimplementasikan secara sembrono/asal-asalan, melainkan karena kebijakan itu sendiri memang jelek. Penyebab dari kesemua ini, kalau mau dicari, tidak lain karena kebijakan itu telah didasari oleh tingkat pemahaman yang tidak memadai mengenai persoalan yang akan ditanggulangi. Dalam kaitan dengan hal tersebut di atas, menyatakan secara tegas bahwa setiap kebijakan pemerintah pada hakikatnya memuat hipotesis mengenai kondisi awal dan akibat-akibat yang diramalkan bakal terjadi sesudahnya. Dengan demikian, dasar pemikiran yang digunakan oleh pembuat kebijakan selalu berupa pertanyaan, jika X dilakukan pada waktu tertentu (W_1), maka Y akan terjadi pada waktu tertentu (W_2). Jadi setiap kebijakan pada dasarnya memuat teori mengenai hubungan sebab-akibat (kausalitas).

5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan sedikit mata rantai penghubungnya.

Pada kebanyakan program pemerintah sesungguhnya teori yang mendasari kebijakan jauh lebih kompleks daripada sekedar berupa jika X dilakukan. Maka, terjadi Y dan mata rantai hubungan kausalitasnya oleh Z, bahwa kebijakan yang hubungan sebab akibatnya tergantung pada mata rantai yang amat panjang maka akan mudah sekali mengalami keretakan, sebab semakin panjang mata rantai kausalitas, semakin besar hubungan timbal balik antara mata rantai dan semakin menjadi kompleks implementasinya.

Dengan perkataan lain, semakin banyak hubungan dalam mata rantai, semakin besar pula resiko bahwa beberapa diantaranya kelak terbukti amat lemah.

6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil.

Implementasi yang sempurna menuntut adanya persyaratan bahwa hanya terdapat badan pelaksana, yang untuk keberhasilan misi diembannya tidak perlu tergantung pada badan lain atau walaupun dalam pelaksanaannya harus melibatkan badan lainnya, maka hubungan dengan organisasi ini haruslah pada tingkat minimal, dalam artian jumlah kepentingannya. Jika implementasi suatu program ternyata membutuhkan serangkaian tahapan dan jalinan hubungan, melainkan juga kesepakatan terhadap setiap tahapan di antara sejumlah besar pelaku yang terlibat, maka peluang bagi keberhasilan implementasi program, bahkan hasil akhir yang diharapkan kemungkinan akan semakin berkurang.

7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.

Adanya pemahaman yang menyeluruh mengenai kesepakatan terhadap tujuan haruslah dirumuskan dengan jelas, spesifik dan lebih baik apalagi dapat dikuantifikasikan, dipahami serta disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam organisasi, bersifat saling melengkapi dan mendukung serta mampu berperan selaku pedoman dengan nama pelaksana program dapat dimonitor.

Kendatipun demikian, berbagai penelitian telah mengungkapkan, bahwa dalam kehidupan nyata tujuan yang akan dicapai organisasi atau suatu program tidak jarang sukar untuk diidentifikasi atau telah dirumuskan dalam istilah-istilah yang kabur. Bahkan, untuk sementara tujuan-tujuan resmi, kemungkinan tidak saling melengkapi.

Sehingga kemungkinan menimbulkan konflik yang tajam atau kebingungan, khususnya dalam hal para ahli/kelompok profesional atau kelompok-kelompok lain yang terlibat dalam program lebih mementingkan tujuan-tujuan mereka sendiri. Tujuan-tujuan resmi kerap kali tidak dipahami dengan baik, mungkin karena komunikasi dari atas ke bawah dan ke luar dari kantor pusat (misalnya Departemen) tidak memadai. Bahkan seandainya tujuan-tujuan tersebut pada awal mulanya dipahami dan disepakati. Tidak ada jaminan bahwa keadaan seperti ini akan terus terpelihara selama pelaksanaan program, mengingat kenyataan bahwa tujuan-tujuan itu cenderung mudah berubah, dilipatgandakan dan diganti/diselewengkan. Kecenderungan manapun yang bakal terjadi, akan menyebabkan rumitnya proses implementasi. Dari uraian ini dapat menyaksikan bahwa penyebab kegagalan implementasi kebijaksanaan mungkin berasal dari tahap-tahap dalam proses kebijaksanaan.

8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.

Persyaratan ini mengandung makna bahwa dalam mengayunkan langkah menuju tercapainya tujuan-tujuan yang telah disepakati, masih dimungkinkan untuk memerinci dan menyusun dalam urutan-urutan yang tepat seluruh tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap pihak yang terlibat. Kesukaran-kesukaran untuk mencapai kondisi implementasi yang sempurna ini tidak dapat kita sangsikan lagi. Di samping itu, juga diperlukan, bahkan dapat dikatakan tidak dapat dihindarkan, keharusan adanya ruang yang cukup bagi kebebasan bertindak dan melakukan improvisasi, sekalipun dalam program yang telah dirancang secara ketat.

Beberapa teknologi administrasi, semisal *network planing and control*, sedikitnya dapat dimanfaatkan untuk mengendalikan implementasi proyek dengan cara mengidentifikasi tugas-tugas yang harus diselesaikan, antara hubungan diantara masing-masing tugas dan urutan logis pelaksanaannya. Tentu saja akan masih ada persoalan-persoalan manajerial yang lain. Semisal upaya menjamin bahwa tugas-tugas tersebut dilaksanakan dengan benar dan tepat pada waktunya serta melakukan tindakan-tindakan perbaikan yang diperlukan apabila ternyata tugas tersebut melenceng dari rencana.

9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.

Persyaratan ini menggariskan bahwa harus ada komunikasi dan koordinasi yang sempurna diantara berbagai unsur atau badan yang terlibat dalam program. Dalam hubungan ini menyatakan bahwa guna mencapai implementasi yang sempurna barangkali diperlukan suatu sistem satuan administrasi tunggal seperti halnya satuan tentara yang besar yang hanya memiliki satu satuan komando, tanpa konflik didalamnya. Tentu saja sarjana ini tidak bermaksud untuk menganjurkan sistem semacam itu. Perlu dicamkan bahwa terlepas dari persoalan bahwa adanya koordinasi yang sempurna, kondisi ini sebenarnya hampir tidak mungkin bisa diwujudkan dalam kehidupan nyata.

10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Pernyataan yang terakhir ini menjelaskan bahwa harus terdapat kondisi ketundukan penuh dan tidak ada penolakan sama sekali terhadap perintah/komando dari siapa pun dalam sistem administrasi itu.

Apabila terdapat potensi penolakan terhadap perintah itu maka ia harus dapat diidentifikasi oleh kecanggihan sistem informasinya dan dicegah sedini mungkin oleh sistem pengendalian yang andal.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan syarat implementasi kebijakan meliputi tindakan yang dilakukan pemerintah dalam upaya menaikkan pemasukan daerah serta dalam rangka mensejahterakan masyarakatnya untuk berperan dalam menyampaikan aspirasi terhadap berbagai inisiatif pembangunan yang akan mempengaruhi kehidupan dan lingkungannya.

3. Faktor-faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Mazmanian dan Sabatier (1983:71) mengemukakan bahwa "peran penting implementasi kebijakan ialah mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada proses implementasi".

Variabel yang dimaksud menurut Mazmanian dan Sabatier (Ekowati, 2009: 40) diklasifikasikan menjadi 3 kategori besar yaitu.

1. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan.
2. Kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasi.
3. Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan.

Edwards III (Ekowati, 2009: 37) mengemukakan pertimbangan 4 faktor kritis atau variabel dalam implementasi kebijakan negara sebagai berikut.

1. *Communication* (Komunikasi);
2. *Resources* (Sumber daya);
3. *Disposition/Attitudes* (Disposisi/Sikap);
4. *Bureaucratic structure* (Struktur birokrasi).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, lebih lanjut Ekowati (2009: 37) menjelaskan faktor-faktor implementasi kebijakan sebagai berikut.

1. Komunikasi;

Agar implementasi efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukan. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima tampak personel dan mereka harus jelas, akurat dan konsisten. Jika pembuat kebijakan melihat pelaksanaan tidak secara jelas spesifikasinya, mereka boleh jadi tidak memahami siapa yang mereka arahkan sesungguhnya, kebingungan implementator tentang apakah yang mereka lakukan meningkatkan kesempatan bahwa mereka tidak akan melaksanakan suatu kebijakan yang diharapkan. Tidak cukupnya komunikasi juga memberikan implementator dengan kebijaksanaan agar mereka berusaha kembali kebijakan umum ke tindakan spesifik. Kebijaksanaan ini tidak akan diperlukan melatih pencapaian tujuan pembuat keputusan aslinya. Jadi, instruksi implementasi yang tidak dikirim yang mengalami kesalahan atau kerusakan dalam transmisinya atau yang samar atau tidak konsisten secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan. Arahan yang tepat mengarahkan pada implementasi lebih kreatif dan mampu adaptasi.

2. Sumber daya;

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi dan bukan bagaimana secara akurat komunikasi dikirim. Personel bertanggungjawab membawa kebijakan kurang sumber daya melakukan tugasnya secara efektif, implementasi akan tidak efektif.

Pentingnya sumber daya meliputi, ukuran staf perlu keahlian, informasi cukup bagaimana mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber lain terkait implementasi. Kewenangan menjamin bahwa kebijakan diarahkan pada sebagaimana yang diharapkan dan fasilitas (bangunan, sarana prasarana, tanah dan persediaan) yang digunakan untuk memberikan pelayanan. Sumber daya yang tidak memadai akan berakibat pada hukum atau tidak dapat dilaksanakan, pelayanan tidak akan dapat diberikan dan peraturan tidak dapat dikembangkan.

3. Disposisi/Sikap;

Disposisi atau sikap (implementor) merupakan faktor krusial ketiga pada pendekatan studi implementasi kebijakan negara. Jika implementasi menghasilkan secara efektif, bukan hanya harus pelaksanaannya mengetahui tentang apakah yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi mereka harus juga membawa kebijakan sebagaimana yang diinginkan. Implementor melatih mempertimbangkan kebijaksanaan dalam implementasi kebijakan. Salah satu alasan untuk membebaskan diri dari superior utamanya yang merumuskan kebijakan. Cara implementasi melatih kebijaksanaannya, tergantung pada bagian besar atas disposisinya ke arah kebijakan. Sikapnya akan mempengaruhi oleh cara dia memandang ke arah kebijakan perseorangan dan bagaimana melihat kebijakan mempengaruhi organisasinya dan personel. Implementor tidak selalu melaksanakan kebijakan yang secara asli dibuat oleh pembuat keputusan secara konsekuen, pembuat keputusan seringkali dihadapkan pada tugas mencoba memanipulasi kebijakan.

4. Struktur birokrasi.

Jika sumber daya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan dan ingin dilakukan.

Implementasi masih gagal karena kurangnya dalam struktur birokrasi fragmentasi organisasi boleh jadi menghalangi koordinasi diperlukan dalam implementasi secara berhasil suatu kebijakan yang kompleks mensyaratkan kerja sama (*cooperation*) banyak orang, dan juga pemborosan sumber daya yang langka merintangi perubahan, menciptakan kebingungan, mengarahkan kerja kebijakan pada tujuan silang dan menghasilkan fungsi penting terlupakan. Kebijakan mengelola unit organisasi mereka mengembangkan *Standard Operating Procedures* (SOPs). Mengambil alih situasi rutin dengan menguraikan aturan SOPs didesain kebijakan terus menerus seringkali tidak tampak sebagai kebijakan baru dan banyak tindakan yang tidak diinginkan. SOPs terkadang merintangi daripada membantu kebijakan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menjelaskan bahwa untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna tidaklah sesederhana yang dibayangkan, akan tetapi masih dihadapkan pada berbagai kesukaran-kesukaran seperti mudah tidaknya masalah yang akan dikendalikan. Kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasi serta pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan.

H. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu merupakan literatur yang menggambarkan konsep teori maupun hasil penelitian yang relevan dengan fokus permasalahan. Oleh karena itu, dalam kajian penelitian terdahulu ini dikemukakan beberapa hasil penelitian terdahulu. Konsep-konsep teori yang mendukung supaya memberikan gambaran awal dan dapat menjadi rujukan dan penguatan tentang fokus permasalahan yang diteliti sebagai berikut.

1. Maimun (2016) melakukan penelitian dengan judul Implementasi Efisiensi Anggaran dan Efektivitas Organisasi dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pegawai Kota Lhokseumawe. Penelitian ini memfokuskan terhadap upaya meningkatkan kinerja pegawai. Penelitian mengkaji sejauhmana implementasi efisiensi anggaran, efektivitas organisasi dan kinerja pegawai.
2. Marwoto (2019) meneliti mengenai Implementasi kebijakan K3 dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bandung. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya efektivitas kerja pegawai. Masalah ini diduga terkait dengan implementasi kebijakan yang belum berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, yang menjadi pernyataan masalah (*problem statement*) adalah efektivitas kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung masih rendah.
3. Handayani (2018) meneliti mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah SMK Negeri di Kabupaten Sumedang. Fokus permasalahan yaitu belum optimalnya pengelolaan Dana Bantuan Operasional SMK Negeri di Kabupaten Sumedang.

Tabel 2.1
Kajian Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
<ul style="list-style-type: none"> - Nama: Maimun - Tesis: Implementasi Efisiensi Anggaran dan Efektivitas Organisasi dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pegawai Kota Lhokseumawe - Tahun: 2016 - PT: Universitas Malikussaleh Lhokseumawe 	Variabel implementasi dan menggunakan pendekatan kuantitatif.	Teori yang digunakan.	Hasil penelitian menunjukkan proses anggaran dan efektivitas organisasi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap kinerja pegawai Kota Lhokseumawe.
<ul style="list-style-type: none"> - Nama: Eddy Marwoto - Tesis: Implementasi kebijakan K3 dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Pegawai Satpol PP di Kota Bandung - Tahun: 2019 - PT: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 	Variabel implementasi kebijakan dan teori yang digunakan (unsur-unsur implementasi).	Teori yang digunakan.	Implementasi kebijakan K3 yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Bandung secara empirik telah memberikan pengaruh terhadap efektivitas kerja pegawai.
<ul style="list-style-type: none"> - Nama: Sifa Rini Handayani - Tesis: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah SMKN di Kabupaten Sumedang - Tahun: 2018 - PT: STIA Sebelas April Sumedang 	Meneliti BOS Reguler dan metode penelitian kualitatif.	Teori yang digunakan, dan jenjang pendidikan.	Akuntabilitas pengelolaan dana BOS sudah baik, terdapat faktor yang menghambat pengelolaan dana BOS dan terdapat upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan.

Berdasarkan tabel di atas, peneliti menyimpulkan dengan membandingkan kajian teori terdahulu akan memunculkan teori baru. Implementasi kebijakan dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan dan mengoreksi penyimpangan.

I. Kerangka Pemikiran

Administrasi merupakan proses yang pada umumnya terdapat pada semua usaha kelompok, negara atau swasta, sipil atau militer, usaha besar atau kecil. Friedrich (Wahab, 2018: 3) definisi kebijakan (*policy*) yaitu.

Suatu tindakan yang mengarah pada yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Kebijakan dibuat oleh organisasi yang berusaha melakukan tindakan nyata untuk mencapai tujuan dalam memecahkan suatu persoalan, pusat perhatian dari kebijakan tidak hanya pada apa yang dilakukan oleh pelaku, melainkan termasuk apa yang tidak dilakukan organisasi. Implementasi kebijakan yang diterapkan menjadi kunci keberhasilan. Peran pelaku kebijakan dan adanya pengawasan, diperlukan untuk mendukung kebijakan serta perlu adanya dasar hukum sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas, kewajiban, larangan dan sanksi.

Nugroho (2017: 74) implementasi kebijakan pada prinsipnya yaitu “cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya”. Lebih lanjut, Van Meter dan Van Horn (Wahab, 2018: 65) bahwa.

Implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Kesimpulan uraian di atas, implementasi kebijakan yaitu suatu tindakan yang mengarah pada yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan tertentu seraya mencari peluang mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dalam Pasal 3 dan 4 sebagai berikut.

Penggunaan dana BOS Reguler dilakukan berdasarkan prinsip.

1. Fleksibilitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler dikelola sesuai dengan kebutuhan sekolah.
2. Efektivitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah.

3. Efisiensi yaitu penggunaan dana BOS Reguler diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal.
4. Akuntabilitas yaitu penggunaan BOS Reguler dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Transparansi yaitu penggunaan dana BOS Reguler dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Dana BOS Reguler diberikan kepada Sekolah. Sekolah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. Mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik (Data Pokok Peserta Didik) sesuai dengan kondisi riil di sekolah sampai dengan batas waktu yang ditetapkan setiap tahun.
2. Memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik.
3. Memiliki izin operasional berlaku bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik.
4. Memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 di 3 tahun terakhir.
5. Bukan satuan pendidikan kerja sama.

Implementasi kebijakan merupakan salah satu aspek penting dari proses untuk pencapaian hasil kerja. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn (Agustino, 2018: 141) dapat dipengaruhi berdasarkan unsur-unsur sebagai berikut.

1. Ukuran dan tujuan, diperlukan untuk mengarahkan dalam melaksanakan kebijakan, hal ini dilakukan agar sesuai dengan program yang sudah direncanakan.
2. Sumberdaya Kebijakan, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi dengan pemanfaatan SDM, biaya dan waktu. Sumber kebijakan tersebut yang sangat diperlukan untuk keberhasilan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Sumber Daya Manusia sangat penting karena sebagai sumber penggerak dan pelaksana kebijakan, modal diperlukan untuk kelancaran pembiayaan kebijakan agar tidak menghambat proses kebijakan. Sedangkan, waktu merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan kebijakan, karena waktu sebagai pendukung keberhasilan kebijakan.
3. Keberhasilan kebijakan, bisa dilihat dari sifat atau ciri badan/instansi pelaksana kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para badan atau instansi pelaksananya.

4. Sikap/kecenderungan para pelaksana, sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.
5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik.
6. Menilai kinerja keberhasilan, implementasi kebijakan adalah sejauhmana lingkungan eksternal mendukung keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan, lingkungan eksternal tersebut adalah ekonomi, sosial dan politik.

Implementasi kebijakan pasti terdapat faktor penghambat, setiap tindakan pasti melalui hambatan yang tidak mudah. Implementasi kebijakan mempunyai faktor-faktor penghambat menurut Sunggono (1994: 149) sebagai berikut.

1. Isi kebijakan, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Ke-empat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumberdaya-sumberdaya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.
2. Informasi, implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya adanya akibat dari suatu gangguan komunikasi.
3. Dukungan, pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.
4. Pembagian potensi, sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi kebijakan publik ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi.

Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggungjawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Kebijakan lebih efektif apabila implementasinya didukung oleh sarana yang memadai. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi agar implementasi kebijakan dapat terlaksana dengan baik menurut Sunggono (1994: 158) berikut.

1. Peraturan hukum ataupun kebijakan itu sendiri, di mana terdapat kemungkinan adanya ketidakcocokan antara kebijakan dengan hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.
2. Mentalitas petugas yang menerapkan hukum atau kebijakan, para petugas hukum (secara formal) harus memiliki mental yang baik dalam melaksanakan (menerapkan) suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Sebab apabila terjadi yang sebaliknya, maka akan terjadi gangguan atau hambatan dalam melaksanakan kebijakan/peraturan.
3. Fasilitas, diharapkan untuk mendukung pelaksanaan peraturan hukum. Apabila suatu peraturan perundangan ingin terlaksana dengan baik, harus pula ditunjang oleh fasilitas-fasilitas yang memadai agar tidak menimbulkan gangguan atau hambatan dalam pelaksanaannya.
4. Warga masyarakat sebagai objek, dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan hukum, dan perilaku warga masyarakat seperti yang dikehendaki oleh peraturan perundangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat tujuan dari implementasi kebijakan BOS Reguler. Besaran BOS Reguler di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2020 yaitu sebagai berikut.

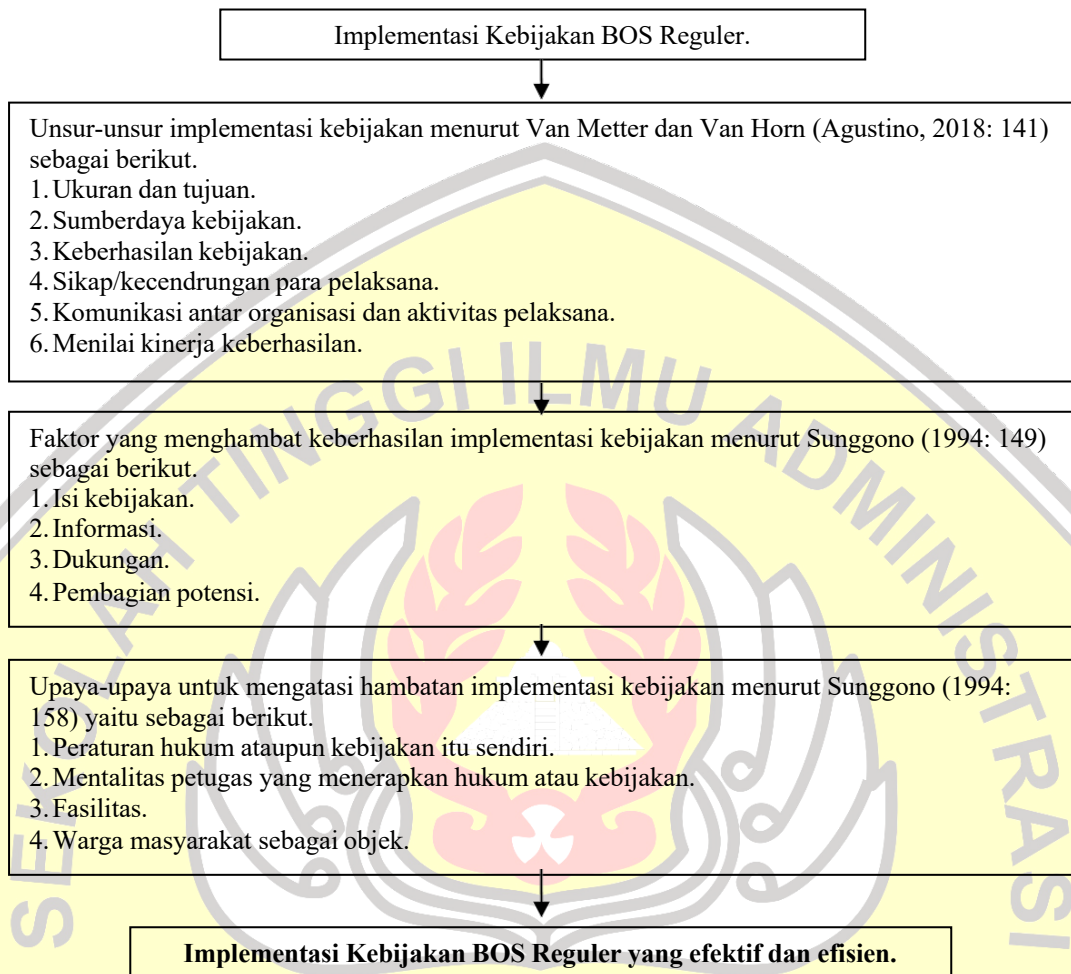
Tabel 2.2
Besaran BOS Reguler di Kabupaten Sumedang

Kabupaten	Sekolah (Unit)	Siswa (Orang)	Dana BOS Reguler (Rp)
Sumedang	863	189.053	209.545.200.000,-
SD	597	101.115	91.003.500.000,-
SMP	119	42.860	47.146.000.000,-
SMA	25	15.679	23.518.500.000,-
SMK	88	27.302	43.683.200.000,-
SLB	34	2.097	4.194.000.000,-

Sumber: Renstra Disdik Sumedang, 2020-2024

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dana BOS Reguler ditujukan untuk keperluan operasional yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan seperti membeli alat multimedia untuk kegiatan belajar mengajar, penerimaan siswa/i baru dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah.

Peneliti menyajikan kerangka pemikiran seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Peneliti menyajikan kisi-kisi pertanyaan sebagai berikut.

STIA
SEBELAS APRIL
SUMEDANG

Tabel 2.3
Kisi-kisi Pertanyaan

Fokus	Dimensi	Indikator	Item
Implementasi kebijakan (Van Metter dan Van Horn (Agustino, 2018: 141)).	1. Ukuran dan tujuan.	a. Ukuran keberhasilan kebijakan.	1
		b. Cara mencapai keberhasilan kebijakan.	2
	2. Sumberdaya kebijakan.	a. SDM yang handal.	3
		b. Cara membina SDM yang handal.	4
	3. Keberhasilan kebijakan.	a. Kriteria persyaratan kebijakan.	5
		b. Cara memenuhi kriteria persyaratan.	6
4. Sikap/kecenderungan para pelaksana.	a. Sikap pelaksana kebijakan.	7	
	b. Cara membina sikap pelaksana.	8	
5. Komunikasi antar organisasi.	a. Komunikasi antar instansi.	9	
	b. Cara menjalin komunikasi yang jelas.	10	
6. Menilai kinerja keberhasilan.	a. Ukuran keberhasilan evaluasi.	11	
	b. Cara mencapai ukuran evaluasi.	12	
Faktor yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan (Sunggono (1994: 149)).	1. Isi kebijakan.	a. Pemahaman tujuan program.	13
		b. Pemahaman sasaran program.	14
	2. Informasi.	a. Menerapkan penyampaian informasi.	15
		b. Pemahaman isi informasi antar instansi.	16
3. Dukungan.	a. Melaksanakan dukungan fasilitas.	17	
	b. Dukungan kerjasama antar instansi.	18	
4. Pembagian potensi.	a. Melaksanakan diferensiasi tugas program.	19	
	b. Pembagian tugas dengan masyarakat.	20	
Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan implementasi kebijakan (Sunggono (1994: 158)).	1. Isi kebijakan (Peraturan hukum).	a. Pemahaman tujuan program.	21
		b. Pemahaman sasaran program.	22
	2. Informasi (Mentalitas petugas).	a. Menerapkan penyampaian informasi.	23
		b. Pemahaman isi informasi antar instansi.	24
3. Dukungan (Fasilitas).	a. Melaksanakan dukungan fasilitas.	25	
	b. Dukungan kerjasama antar instansi.	26	
4. Pembagian potensi (Warga masyarakat).	a. Melaksanakan diferensiasi tugas program.	27	
	b. Pembagian tugas dengan masyarakat.	28	

J. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian yang diajukan peneliti yaitu implementasi program BOS Reguler SMP Negeri di Kabupaten Sumedang dipengaruhi oleh ukuran dan tujuan, sumberdaya kebijakan, keberhasilan kebijakan, sikap atau kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi serta menilai kinerja keberhasilan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif atau sering disebut dengan metode naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah (*natural setting*) dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Sugiyono (2010: 1) bahwa.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang ilmiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai *instrument* kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penelitian kualitatif berlandaskan paradigma *constructivism*. Hal ini sesuai Creswell (Sugiyono, 2010: 10) bahwa ‘pengetahuan itu bukan hanya merupakan hasil pengalaman terhadap fakta, tetapi merupakan hasil konstruksi pemikiran subjek yang diteliti’. Bentuk kualitatif yaitu proses dan makna (perspektif subjek).

Metode penelitian kualitatif digunakan dianggap menyesuaikan dengan kenyataan yang dihadapi di lapangan. Hal ini sesuai Maleong (2016: 17) bahwa.

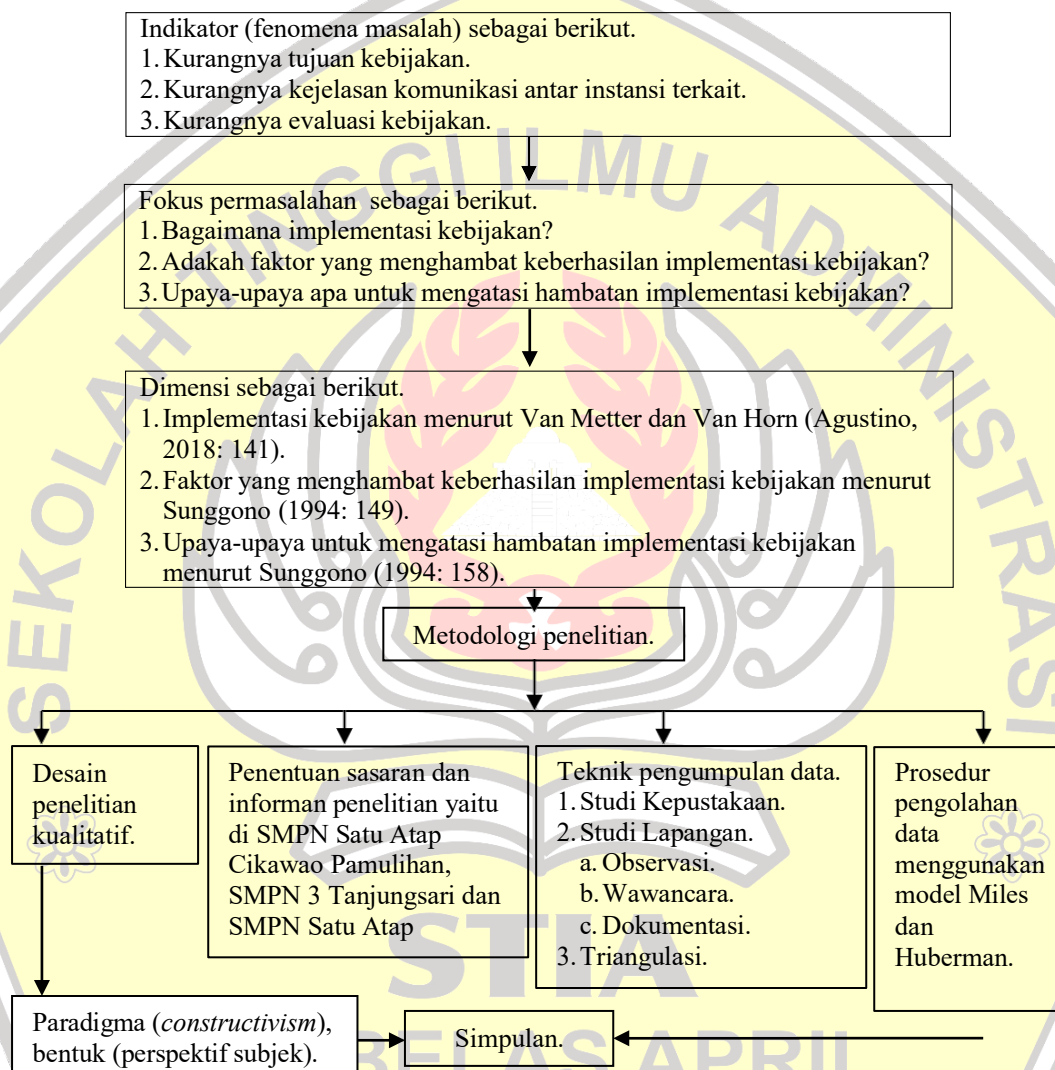
Metode kualitatif digunakan karena pertimbangan sebagai berikut.

1. Dapat menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan-kenyataan ganda.
2. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara penelitian dan responden.
3. Metode ini lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif diharapkan data yang didapat lebih lengkap, jelas dan pasti. Hal ini sesuai Sugiyono (2010: 205) bahwa.

Dengan digunakannya metode kualitatif, maka data yang didapat lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Penggunaan metode kualitatif ini, bukan karena metode ini baru dan lebih *trendy*, tetapi memang permasalahan lebih tepat dicarikan jawabannya dengan metode kualitatif.

Peneliti menyajikan desain penelitian seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini mengamati implementasi kebijakan BOS Reguler SMP Negeri di Kabupaten Sumedang menggunakan metode kualitatif dengan harapan diperoleh data yang lebih tuntas, pasti, sehingga dapat memiliki kredibilitas yang tinggi sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

B. Penentuan Sasaran dan Informan Penelitian

1. Penentuan Sasaran

Penentuan sasaran merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian. Penentuan sasaran dalam penelitian yaitu untuk mendapatkan jawaban maupun solusi dari permasalahan yang terjadi. Sugiyono (2010: 206) bahwa.

Dalam kualitatif, data yang dipilih dan mengutamakan *perspektif emic*, artinya mementingkan pandangan informan yakni bagaimana mereka memandang dan menafsirkan dunia dari pendirinya. Peneliti tidak bisa memaksakan kehendaknya untuk mendapatkan data yang diinginkan.

Kegiatan pengumpulan data selalu berhadapan dengan objek yang diteliti baik berupa manusia, benda maupun aktivitas. Penentuan sasaran ini disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian dalam hal ini yaitu informan yang dianggap dapat memberikan informasi yang lengkap mengenai implementasi kebijakan BOS Reguler SMP Negeri di Kabupaten Sumedang, maka peneliti mengajukan penentuan sasaran penelitian sebagai berikut.

Tabel 3.1
Penentuan Sasaran di SMPN Satu Atap Cikawao

Jabatan (Bagian)	Jumlah (Orang)
Komite Sekolah	3
Kepala Sekolah	1
Staf Tata Usaha	3
Guru	19
Jumlah (Orang)	26

Sumber: Renstra SMPN Satu Atap Cikawao, 2020-2024

Tabel 3.2
Penentuan Sasaran di SMPN 3 Tanjungsari

Jabatan (Bagian)	Jumlah (Orang)
Komite Sekolah	3
Kepala Sekolah	1
Staf Tata Usaha	3
Guru	19
Jumlah (Orang)	26

Sumber: Profil SMPN 3 Tanjungsari, 2021

Tabel 3.3
Penentuan Sasaran di SMPN Satu Atap Cimanggung

Jabatan (Bagian)	Jumlah (Orang)
Komite Sekolah	1
Kepala Sekolah	1
Staf Tata Usaha	3
Guru	19
Jumlah (Orang)	24

Sumber: Renstra SMPN Satu Atap Cimanggung, 2020-2024

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh jumlah sasaran penelitian sebanyak 76 orang yang merupakan seluruh pegawai SMPN Satu Atap Cikawao Pamulihan (26 orang), SMP Negeri 3 Tanjungsari (26 orang) dan SMPN Satu Atap Cimanggung (24 orang).

2. Informan Penelitian

Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang sedang diteliti. Hal ini sesuai Sugiyono (2010: 206) informan penelitian yaitu “orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian”. Informan penelitian ini berjumlah 6 orang, dengan rincian sebagai berikut.

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Kepala Sekolah | ; 3 orang |
| 2. Staf Tata Usaha | ; 3 orang + |
| Jumlah | 6 orang |

Peneliti mengambil informan tersebut didasarkan pada pertimbangan yang bersangkutan berkompeten terhadap implementasi kebijakan BOS Reguler.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini sebagai berikut.

1. Studi Kepustakaan, mempelajari literatur, buku ilmiah, peraturan-peraturan yang berlaku, laporan, arsip serta dokumen tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian.
2. Studi Lapangan.
 - a. Observasi, melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian untuk mencatat segala kegiatan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti, dimana peneliti tidak ikut terlibat dalam proses kerja.
 - b. Wawancara, meminta penjelasan kepada informan penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, mendalam serta terarah sesuai dengan pedoman.
 - c. Dokumentasi, mengumpulkan data-data berupa catatan harian lapangan yang merupakan pelengkap hasil wawancara dan observasi.
3. *Triangulasi*, teknik pengumpulan yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik dan sumber data yang telah ada sekaligus menguji kredibilitas data.

D. Prosedur Pengolahan Data

Prosedur pengolahan data menggunakan model Miles dan Huberman menurut Sugiyono (2010: 246) yang dapat dijelaskan peneliti sebagai berikut.

1. Reduksi Data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

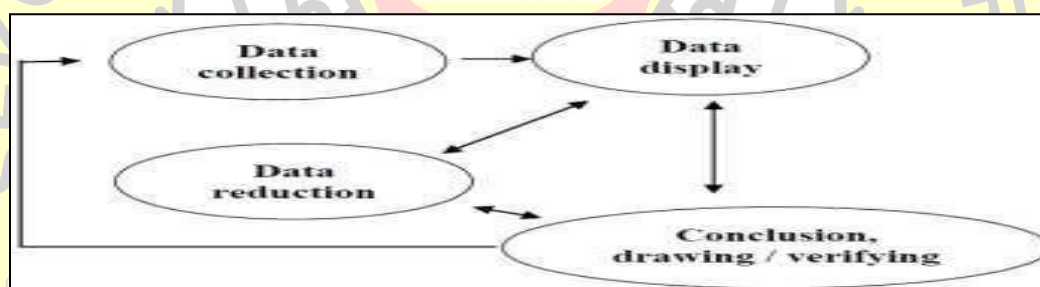
2. Penyajian Data, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan yang sejenisnya. Miles dan Huberman (Sugiyono, 2010: 249) bahwa.

The most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text.

(Yang paling sering digunakan untuk penyajian data-data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif).

3. Kesimpulan, temuan yang dapat berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, serta hipotesis atau teori.
4. *Triangulasi*, teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data serta sumber data yang telah ada.

Prosedur pengolahan data dapat digambarkan peneliti sebagai berikut.



Gambar 3.2 Prosedur Pengolahan Data

Pengujian kredibilitas (keabsahan) data menurut Sugiyono (2010: 122) sebagai model empiris yang dapat dijelaskan peneliti dilakukan sebagai berikut.

1. Perpanjangan Pengamatan, dengan kembali ke lapangan untuk melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Hal ini berarti hubungan dengan informan semakin semakin akrab, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti membuat simpulan sebagai berikut.

1. Implementasi kebijakan BOS Reguler SMP Negeri di Kabupaten Sumedang sudah cukup baik, berdasarkan unsur berikut.
 - a. Ukuran dan tujuan, menggunakan jabatan dalam melaksanakan pengelolaan dana BOS sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai Juklak dan Juknis.
 - b. Sumberdaya kebijakan, menjalankan kepatuhan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana BOS.
 - c. Keberhasilan kebijakan, adanya prosedur yang cukup dipahami dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - d. Sikap atau kecenderungan para pelaksana, dilakukan pengelolaan organisasi dalam pengelolaan dana BOS yang sesuai aturan dan memberdayakan sumberdaya yang ada.
 - e. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, dilakukan dengan pencapaian tujuan dalam pengelolaan dana supaya tercapai dikarenakan pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.
 - f. Menilai kinerja keberhasilan, dilakukan dengan kebijakan yang diambil oleh pihak eksekutif dengan memberikan kebijakan terukur yang dapat mewujudkan terlaksananya pengelolaan dana secara efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti mempunyai simpulan akhir bahwa implementasi kebijakan merupakan salah satu aspek penting dari proses untuk pencapaian hasil kerja. Keberhasilan implementasi kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn dapat mempengaruhi implementasi kebijakan BOS Reguler SMP Negeri di Kabupaten Sumedang berdasarkan unsur-unsur seperti ukuran dan tujuan, sumberdaya kebijakan, keberhasilan kebijakan, sikap atau kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana serta menilai kinerja keberhasilan.

2. Terdapat faktor yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan BOS Reguler SMP Negeri di Kabupaten Sumedang, berdasarkan faktor berikut.
 - a. Isi kebijakan, ketaataan terhadap peraturan dalam pengelolaan dana BOS masih sering tumpang tindih peraturan dalam pelaporan keuangannya.
 - b. Informasi, adanya aturan-aturan yang kurang dipahami oleh pengelola dana.
 - c. Dukungan, masih adanya tujuan yang belum sesuai dengan rencana.
 - d. Pembagian potensi, masih belum adanya ketepatan waktu pelaksanaan pencairan BOS.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mempunyai simpulan akhir bahwa implementasi kebijakan pasti terdapat faktor penghambat, setiap tindakan pasti melalui hambatan yang tidak mudah. Implementasi kebijakan BOS Reguler SMP Negeri di Kabupaten Sumedang mempunyai faktor penghambat menurut Sunggono seperti isi kebijakan, informasi, dukungan dan pembagian potensi.

3. Terdapat upaya-upaya untuk mengatasi hambatan implementasi kebijakan BOS Reguler SMP Negeri di Kabupaten Sumedang, berdasarkan unsur berikut.

- a. Peraturan hukum ataupun kebijakan itu sendiri, dalam mengantisipasi keterlambatan pencairan dengan dana talang yang dipinjam pihak sekolah.
- b. Mentalitas petugas yang menerapkan hukum atau kebijakan, dengan menyimpan uang di Bank melalui Bendahara Sekolah.
- c. Fasilitas, dengan menempuh semua prosedur yang telah ditetapkan dalam aturan pengelolaan dana BOS.
- d. Warga masyarakat sebagai objek, dengan mempertimbangkan asas moralitas dalam pengelolaan dana dengan memilih pengelola yang memiliki kejujuran dan integritas yang tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti mempunyai simpulan akhir bahwa kebijakan akan menjadi lebih efektif apabila dalam pembuatan maupun implementasinya didukung oleh sarana yang memadai. Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar implementasi kebijakan BOS Reguler SMP Negeri di Kabupaten Sumedang dapat terlaksana dengan baik menurut Sunggono seperti peraturan hukum ataupun kebijakan itu sendiri, mentalitas petugas yang menerapkan hukum atau kebijakan, fasilitas dan warga masyarakat sebagai objek.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, peneliti mencoba mengajukan saran berikut.

1. Antisipasi dana pencairan BOS Reguler SMP Negeri di Kabupaten Sumedang, dengan mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten maupun di tingkat Pusat, supaya pihak sekolah tidak lagi menggunakan dana talang yang dipinjam untuk mengantisipasi keterlambatan pencairan dana BOS.

2. Rencanakan tujuan BOS Reguler SMP Negeri di Kabupaten Sumedang dengan matang dan sangat terarah, supaya tidak terjadi penyimpangan dalam mencapai tujuan dan sasaran dana BOS.
3. Evaluasi setiap hasil pekerjaan maupun kegiatan dari pengelolaan dana BOS Reguler SMP Negeri di Kabupaten Sumedang secara berkala sesuai termin pencairan dana BOS.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Achmad, A. 2019. *Physical Therapy Special Test II*. Makassar: Profesional physiotherapy.
- Agustino, Leo. 2018. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI-Puslit KP2W.
- Akadun. 2009. *Administrasi Perusahaan Negara*. Bandung. Alfabeta.
- Dunn, William. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua)*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Ekowati, Mas. Roro. 2009. *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis)*. Surakarta, Pustaka Cakra.
- Handyaningrat, S. 2014. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Islamy, Irfan. 2001. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Iskandar, J. 2017. *Teori Sosial*. Bandung: Puspaga.
- Maleong, Lexy. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mazmanian, David dan Sabaties, Paul. 1983. *Implementation and Public Policy*. London, Scott Foresman and Company.
- Mintorogo, A. 2015. *Pengantar Ilmu Administrasi*. Jakarta: STIA LAN Press.
- Nugroho, Riant. 2017. *Public Policy (Edisi Revisi)*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Program Magister Ilmu Administrasi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang. 2020. *Pedoman Penulisan Tesis*. Sumedang: Program Magister Ilmu Administrasi STIA SAS.
- Putra. 2001. *Paradigma Kritis dalam Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Salusu, J. 2016. *Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non-Profit*. Jakarta. Gramedia.

Silalahi, U. 2015. *Studi tentang Ilmu Administrasi (Konsep, Teori dan Dimensi)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung, Alfabeta.

Sunggono, Bambang. 1994. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.

Santoso, Amir. 1990. *Analisa Kebijakan Publik, Jurnal Ilmu Politik Nomor 3*. Jakarta, Gramedia.

Sudrajat, A. R., Ardiansyah, M. D., & Yayat. (2019). PENGARUH KOMUNIKASI ORGANISASI TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI PDAM TIRTA MEDAL SUMEDANG. *Journal Of Regional Public Administration (JRPA)*, 4(2), 63-74. Retrieved from <https://jurnal.ilmuadministrasisebelasapril.ac.id/index.php/jrpa/article/view/69>

Thoha, M. 2015. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Yogyakarta: UGM.

Wahab, Solichin Abdul. 2018. *Analisis Kebijakan, dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wahyudi, S. Agustinus. 2016. *Manajemen Stratejik Pengantar Proses Berpikir Stratejik*. Jakarta. Binarupa Aksara.

Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasi dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung, CV. Mandar Maju.

Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

B. Dokumen-dokumen

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis SMP Negeri Satu Atap Cikawao Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024.

Profil SMP Negeri 3 Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang Tahun 2021.

Profil SMP Negeri 3 Satu Atap Cimanggung Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang Tahun 2021.

